

6-2021

Hubungan Iran-Amerika Serikat Masa Pemerintahan Hassan Rouhani (Telaah Perjanjian JCPOA)

Ayu Maulida Alkholid

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ayumaulidaalkholid@gmail.com

Firmanda Taufiq

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, firmandataufiq@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis>



Part of the [Near and Middle Eastern Studies Commons](#)

Recommended Citation

Alkholid, Ayu Maulida and Taufiq, Firmanda (2021) "Hubungan Iran-Amerika Serikat Masa Pemerintahan Hassan Rouhani (Telaah Perjanjian JCPOA)," *Jurnal Middle East and Islamic Studies: Vol. 8: No. 1*, Article 7.

DOI: 10.7454/meis.v8i1.133

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis/vol8/iss1/7>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Middle East and Islamic Studies* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HUBUNGAN IRAN-AMERIKA SERIKAT MASA PEMERINTAHAN HASSAN ROUHANI (TELAAH PERJANJIAN JCPOA)

Ayu Maulida Alkholid, Firmanda Taufiq

Kajian Timur Tengah, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Indonesia

E-mail: ayumaulidaalkholid@gmail.com, firmandataufiq@gmail.com

Abstract

Relations between Iran and the United States show fluctuating dynamics. The historical relationship and cooperation between the two countries represents how the process works. In fact, during the reign of Shah Reza Pahlavi, Iran-US relations looked good and established important cooperation in several sectors. The political constellation of Iran that continues to intertwine makes the US also respond and issue various policies, including the issue of the nuclear development program. The program during the reign of Hassan Rouhani was also one of the priority policies. Until, the JCPOA agreement was formed between Iran and the P5+1 group countries (US, UK, France, Russia, China, and Germany). However, in 2015, the US tried to get out of the agreement because the contents of the agreement did not match the views of US domestic policy. Political constellations and the process of nuclear development are important discourses in viewing the relationship that is being built between Iran and the US. This article seeks to examine the dynamics of relations and cooperation between Iran and the US during the reign of Hassan Rouhani, the reasons for the US leaving the JCPOA agreement, and the background of Iran continuing its nuclear development. The data collection method that the researcher uses is by collecting various references, both from books, journals, newspapers, online media, and other literature related to the issue of relations and cooperation between Iran and the US during the Hassan Rouhani administration and topics surrounding the cause of the US leaving the JCPOA agreement.

Keywords: Relations, Iran, United States, Hassan Rouhani, JCPOA.

Abstrak

Hubungan antara Iran-Amerika Serikat menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Historisitas hubungan dan kerjasama antara kedua negara merepresentasikan bagaimana proses yang berjalan. Bahkan, pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi hubungan Iran-AS terlihat baik dan menjalin berbagai kerjasama penting di beberapa sektor. Konstelasi politik Iran yang terus berkelindan membuat AS juga merespon dan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk dalam persoalan program pengembangan nuklir. Program tersebut pada masa pemerintahan Hassan Rouhani juga menjadi salah satu kebijakan prioritas. Hingga, terbentuklah perjanjian JCPOA antara Iran dan negara-negara kelompok P5+1 (AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Jerman). Namun, pada tahun 2015, AS berusaha keluar dari kesepakatan tersebut karena isi dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan pandangan kebijakan dalam negeri AS. Konstelasi politik dan proses pengembangan nuklir menjadi diskursus penting dalam

melihat hubungan yang dibangun antara Iran-AS. Artikel ini berusaha mengkaji dinamika hubungan dan kerjasama antara Iran-AS pada masa pemerintahan Hassan Rouhani, penyebab AS keluar dari perjanjian JCPOA, dan latar belakang Iran melanjutkan pengembangan nuklir. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yakni dengan mengumpulkan berbagai referensi, baik dari buku, jurnal, koran, media online, dan literatur lainnya yang terkait dengan persoalan hubungan dan kerjasama antara Iran-AS pada masa pemerintahan Hassan Rouhani dan topik seputar penyebab AS keluar dari perjanjian JCPOA.

Kata Kunci: Hubungan, Iran, Amerika Serikat, Hassan Rouhani, JCPOA.

PENDAHULUAN

Hubungan Iran-Amerika Serikat dalam perkembangannya mengalami proses yang dinamis. Berdasarkan historisnya, hubungan dan kerjasama yang dibangun antar kedua negara sebenarnya tidak seekstrem yang terjadi dalam kisaran satu dekade terakhir (Putri, n.d.). Pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Iran merupakan kolega yang sangat penting bagi AS. Hubungan antar kedua negara tersebut terjalin dengan sangat baik, khususnya dalam bidang ekonomi. Namun, konstelasi politik Iran berubah pasca terjadinya revolusi Islam tahun 1979. Di bawah rezim baru yakni Ayatullah Khomeini, AS kehilangan pengaruhnya atas Iran. Selanjutnya, Iran bangkit dengan wajah baru pasca 25 abad menjadi negara yang diintervensi oleh AS (Sumarno, 2020).

Melihat hal tersebut, konstelasi politik Iran dan AS mengalami

perubahan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berubahnya sistem politik Iran dari monarki menjadi Republik Islam. Wajah baru Republik Islam Iran menampilkan sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih*, yaitu sistem politik negara yang dipimpin oleh seorang mullah atau ulama (Kadir, 2015). Keberhasilan revolusi Islam Iran menjadikan negara tersebut diperhitungkan dalam kancah politik internasional. Sebagai negara penganut Syiah terbesar kemudian menjadikan Khomeini melakukan ekspansi ideologi Islam khususnya paham Syiah ke wilayah negara-negara Timur Tengah lainnya (A. K. Riza, 2017). Sehingga Iran menjadi simbol dunia Islam dalam menumbuhkan kebangkitan dan rasa percaya diri.

Atas dasar tersebut, maka hubungan dan kerjasama antara Iran-AS mengalami dinamika yang membuat keduanya saling berbenturan

kepentingan, baik dari ideologi, politik, dan ekonomi. Hal inilah yang membuat hubungan Iran-AS mengalami pergeseran dari masa Pahlevi hingga Trump. Selain itu, di masa pemerintahan Rouhani isu program pengembangan nuklir Iran juga menjadi persoalan penting dalam melihat bagaimana hubungan kedua negara. Apalagi pasca pengunduran diri AS dari perjanjian JCPOA pada tahun 2015 yang mengakibatkan kedua negara mengalami kerenggangan. Bahkan, AS menjatuhkan sanksi atas Iran, yang membuat negara tersebut kelabakan dan kesulitan dalam sektor ekonominya.

Tidak hanya itu, sebagai salah satu negara yang tidak sepaham dengan AS, apalagi Iran juga berideologi Syiah dan menerapkan Islam dalam konteks pemerintahan. Sehingga, situasi dan kondisi tersebut membuat Iran mengeluarkan kebijakan yang kontra dan berlawanan dengan AS. Bahkan, Iran adalah satu-satunya negara yang menjadi musuh AS di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut membuat hubungan antara Iran-AS semakin rumit. Terlebih AS menerapkan embargo ekonomi atas Iran yang membuat Iran harus berupaya keluar dari jeratan embargo

tersebut. Tidak hanya itu, pengembangan nuklir Iran kedepan akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keamanan AS. Untuk itu, AS harus bersiap-siap dan melakukan strategi dalam menyikapi upaya tersebut. Atas dasar tersebut, studi mengenai perjanjian JCPOA dalam konteks hubungan dan kerjasama antara Iran dan AS perlu ditelusuri lebih terutama mengenai akar permasalahan tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan pelacakan yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai referensi dan literatur, peneliti menemukan beberapa fokus dan aspek yang akan peneliti kaji, yakni terkait bagaimana hubungan dan kerjasama yang dibangun antara Iran-Amerika Serikat pada masa presiden Hassan Rouhani. Selanjutnya, terkait dengan sebab AS keluar dari perjanjian JCPOA, dan latar belakang Iran tetap melanjutkan pengembangan nuklir. Oleh karena itu, berkaitan dengan hubungan dan kerjasama antara Iran-AS, yakni penelitian yang ditulis oleh Hendra Maujana Saragih, yang berjudul *Perubahan Arah Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat Dalam Program Nuklir Iran Pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani*. Penelitian ini membahas

mengenai kebijakan luar negeri Iran terkait dengan pengembangan program nuklir Iran pasca terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden. Perubahan arah kebijakan luar negeri Iran di masa Rouhani menjadi hal penting dalam melihat bagaimana Iran lebih terbuka dengan dunia internasional, terutama mengenai program nuklir yang dikembangkannya. Hal ini merupakan upaya Iran untuk mengurangi sanksi dan embargo yang diterima Iran dari dunia internasional (Saragih, 2018).

Sedangkan, dalam hal penyebab AS keluar dari perjanjian JCPOA, yakni penelitian yang berjudul *Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat vis-à-vis Iran* yang ditulis oleh Muhammad Halil Rahim. Didalam penelitian ini membahas tentang efektivitas kebijakan diplomasi koersif AS terhadap Iran yang dilakukan melalui penerapan sanksi pasca pengunduran diri dari perjanjian JCPOA dan artikel tersebut juga bagaimana presiden Trump memberlakukan sanksi penuh kepada Iran atas ketidakpuasannya terhadap kesepakatan perjanjian JCPOA. (Rahim, 2019)

Selain itu, penelitian terkait dengan pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran, yakni artikel yang

dibahas oleh Obsatar Sinaga yang berjudul *Kepemilikan Nuklir dan Keamanan Nasional Iran: Suatu Studi Kasus*". Penelitian tersebut membahas mengenai kepemilikan nuklir Iran yang menjadi salah satu kebijakan yang digunakan oleh negara sebagai bertahan hidup dan memiliki posisi tawar dengan negara-negara lainnya, termasuk dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat. Sedangkan, Iran dan Arab Saudi juga saling berkontestasi, dimana hubungan Iran dengan Rusia sangat terkait benturan kepentingan politik dengan Arab Saudi (Taufiq, 2018).

Oleh karena itu, berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, di dalam penelitian ini peneliti lebih fokus membahas dan mengkaji bagaimana kebijakan dan keputusan presiden Hassan Rouhani dalam proses pengembangan nuklir Iran. Sehingga, Iran terus berusaha mengembangkan nuklir, meskipun AS keluar dari perjanjian JCPOA yang menjadi salah satu perjanjian mutakhir dalam proses pengembangan nuklir di Iran.

Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha melacak bagaimana dinamika yang terjadi terkait hubungan dan kerjasama yang dibangun antara Iran-Amerika Serikat

pada masa presiden Hassan Rouhani, akar konflik kedua negara, keputusan AS untuk keluar dari perjanjian JCPOA, dan pergeseran orientasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha memahami dan mengkaji bagaimana dinamika hubungan dan kerjasama antara Iran-AS pada masa pemerintahan Hassan Rouhani, penyebab mengapa AS keluar dari perjanjian JCPOA, dan latar belakang Iran tetap melanjutkan pengembangan nuklir. Sedangkan, metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yakni diperoleh dari berbagai referensi, baik dari buku, jurnal, koran, media online, dan literatur lainnya yang terkait dengan persoalan hubungan dan kerjasama antara Iran-AS pada masa pemerintahan Hassan Rouhani dan topik seputar penyebab mengapa AS keluar dari perjanjian JCPOA, dan latar belakang Iran tetap melanjutkan pengembangan nuklir. Selanjutnya, peneliti melakukan pemilihan data dari berbagai referensi yang didapat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan akurat terkait topik dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

politik dan kebijakan luar negeri Iran dan AS, terutama dalam proses pengembangan nuklir.

Secara teknis, peneliti melakukan sortir dari berbagai data yang telah terkumpul dan memilahnya untuk memudahkan dalam pengumpulan data, serta mengumpulkan beberapa informasi yang akuntabel mengenai topik dalam penelitian ini. Selanjutnya, yang terakhir, yakni tahap validasi. Pada tahap ini, maka peneliti menggunakan metode triangulasi data, yakni dengan memvalidasi dengan pengujian, mengkonfirmasi data dan memverifikasi data yang akan peneliti narasikan dalam bentuk deskriptif-analisis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dari berbagai referensi yang didapatkan dengan data-data akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat dan validatif.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori deterensi untuk membantu dalam menganalisis dan menelaah problem penelitian ini. Sementara itu, ketika orang mendengar kata deterensi, maka sering dikaitkan dengan isu nuklir.

Dalam teori deterensi yang dikemukakan oleh Stephen L. Quackenbush menyebutkan bahwa deterensi merupakan sebuah penggunaan ancaman yang dilakukan sebagai upaya dalam meyakinkan pihak lain untuk melakukan usaha pertahanan diri. Untuk mencegah dari serangan, negara harus meyakinkan penyerang, bahwa negara tersebut memiliki kemampuan militer yang efektif. Tidak hanya itu, ancaman akan berlaku jika sebuah negara tersebut diserang. Dalam teori deterensi, disebutkan bahwa beberapa elemen kunci dalam deterensi, yakni asumsi konflik, asumsi rasionalitas, konsep ancaman pembalasan, konsep kerusakan yang tidak dapat diterima, gagasan kredibilitas, dan gagasan

tentang stabilitas pencegahan (Quackenbush, 2016).

Maka, dalam penelitian ini teori deterensi digunakan untuk menelaah seberapa besar upaya deterensi yang dilakukan oleh Iran berjalan dengan efektif atau tidak. Dalam hal ini, Iran sebagai negara yang mengembangkan nuklir dianggap sebagai ancaman bagi AS. Apalagi selama ini Iran bersikeras dalam usaha program pengembangan nuklir, meskipun telah terjadi kesepakatan JCPOA. Oleh karena itu, AS pun akhirnya memberikan sanksi kepada Iran atas dalih untuk menghambat dan menghentikan upaya Iran dalam proses pengembangan nuklir tersebut.

HASIL PENELITIAN

Hubungan dan Kerjasama Iran-Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani

Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979 menjadi revolusi terbesar dan berbeda dalam sejarahnya. Pasalnya, pasca meletusnya revolusi, Iran tampil dengan wajah baru sebagai negara yang menerapkan konsep dan prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahannya. Konsep ini kemudian dikenal dengan konsep

Waliyatul Faqih. Dalam pandangan Khomeini, revolusi Islam bertujuan untuk mengenalkan tentang Islam serta etika Islam dalam menjalankan kebijakan luar negerinya (Mikail & Fatoni, 2019). Keberhasilan Khomeini dalam mewujudkan revolusi Islam Iran telah mengubah tatanan perpolitikan dan tradisi kerajaan yang telah mengakar selama bertahun-tahun.

Pasca revolusi Islam menjadikan konstelasi politik Iran

mengalami dinamika yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan berubahnya hubungan bilateral yang terjalin antara Iran-AS. Dibawah pimpinan rezim Khomeini, Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan AS. Khomeini menganggap bahwa kepentingan AS di kawasan tidak memberikan dampak yang signifikan. Atas dasar tersebut kemudian Iran mengubah kebijakan luar negerinya atas negara-negara Barat, utamanya atas AS (Phoenna & Harmiyati, 2018). Pemutusan hubungan diplomatik ini menjadi awal kerenggangan hubungan bilateral kedua negara. Hal ini mengakibatkan Iran dimusuhi oleh Amerika Serikat dan para sekutunya.

Selain itu, dalam prosesnya terkait program pengembangan nuklir, Iran pada masa Ahmadinejad berusaha menjadikan program nuklirnya sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya. Bahkan, meski AS menghentikan usaha Iran untuk mengembangkan program nuklir. Namun, Ahmadinejad tetap bersikukuh dalam proses pengembangan nuklir. Ia berupaya menghidupkan kembali idealism yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini (Farhan, 2020). Dampaknya, negara-negara Barat melakukan berbagai

negosiasi dengan Iran. Meski akhirnya respon Ahmadinejad tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara-negara Barat, termasuk AS. Bahkan, sikap tersebut dibalas dengan memperberat dan perpanjangan sanksi ekonomi atas Iran karena persoalan pengembangan nuklir tersebut.

Selanjutnya, ketika Hassan Rouhani menjabat sebagai presiden Iran, ia dinilai menjadi representasi baru bagi masyarakat Iran. Meski, di tengah berbagai persoalan serius yang harus dihadapi oleh Iran, terutama terkait isolasi ekonomi dan embargo yang membuat Rouhani harus melakukan kebijakan untuk mencari solusinya. Rouhani juga berusaha memperbaiki ekonomi Iran dengan menjalin normalisasi terhadap AS. Ia juga melakukan negosiasi dan diplomasi terkait penyelesaian program nuklir. Hingga negoiasiasi kelompok P5+1 (AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Jerman). Rouhani berupaya untuk menyelesaikan persoalan nuklir.

Di masa pemerintahan Rouhani, Iran menerapkan 5 prinsip politik luar negeri yang terus dipertahankan sampai saat ini (M. Riza Sihbudi, 1989). Pertama, Iran menolak segala bentuk campur tangan dan intervensi asing di Timur Tengah,

terutama di wilayah Teluk. Kedua, Iran tidak akan mengakui eksistensi Israel sebagai negara resmi. Ketiga, Iran tidak mengakui kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Sebab, jika kesepakatan antara keduanya terjalin, dampaknya akan membuat Palestina semakin tersudutkan. Keempat, Iran bakal terus mempertahankan wilayah Shatt al-Arab, Thums Besar dan kecil, dan Abu Musa yang berada di Selat Hormuz atas klaim negara lain. Kelima, Iran menerapkan prinsip “La Syarqiyyah, La Gharbiyyah (Tidak Timur dan Tidak Barat). Hal ini sesuai kebijakan Iran pasca revolusi 1979, bahwa negara tersebut menerapkan prinsip politik luar negeri non-blok. Sementara itu, berbeda dengan Tunisia lebih menekankan pada identitas dalam kebijakan luar negerinya (Ibad & Muta’ali, 2021).

Dalam penerapan kebijakan politik luar negerinya Hassan Rouhani dikenal lebih mengutamakan etika. Hal ini terbukti saat ia mendapat kritikan keras dari lawan politiknya karena dinilai tunduk dengan kemauan Barat terkait isu program pengembangan nuklir. Saat pembahasan isu nuklir di forum Dewan Keamanan PBB, Rouhani berhasil mencapai kesepakatan

dengan Barat. Hal ini menjadi sebuah prestasi bagi Rouhani untuk menghindarkan Iran dalam peperangan. Meskipun isu nuklir tidak lepas dari perhatian pada masa pemerintahannya. Rouhani lebih mengutamakan kepentingan nasional Iran khususnya pada sektor ekonomi, politik dan sosial (Saragih, 2018). Selain dikenal sebagai presiden, Rouhani juga dikenal sebagai seorang ulama moderat.

Dalam upaya negosiasi hubungan dengan Barat, persoalan nuklir menjadi prioritas utamanya. Hal ini tidak lepas dari upaya Rouhani untuk membebaskan Iran dari sanksi-sakni dan embargo yang dilakukan oleh AS. AS menganggap kestabilan dan keamanan kawasan Timur Tengah dapat terganggu dengan adanya pengembangan nuklir Iran dan menjadi ancaman khususnya bagi AS. Oleh karena itu, AS menerapkan sanksi dan embargo ekonomi kepada Iran. Salah satu dampak dari embargo ini yaitu terbatasnya akses ekonomi dan devisa negara. Hal ini merupakan salah satu kebijakan AS dalam menerapkan *balance of power* negaranya (Ramadhan, 2019).

Dalam masalah ini, teori deterensi dalam pengembangan nuklir di Iran dapat dinilai sebagai upaya

pencegahan peperangan yang lebih besar. Meskipun tujuan utama dari pengembangan nuklir ini untuk kepentingan Iran sendiri dan tidak ada indikasi sebagai senjata pemusnah massal. Namun, AS merespon hal ini sebagai ancaman. Sehingga, konsekuensi yang harus diterima Iran yakni mendapat pengucilan dari berbagai pihak di kancah internasional, khususnya oleh AS.

Jika melihat berbagai perubahan dalam aktivitas kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Rouhani mengindikasikan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses dalam memperbaiki konstelasi ekonomi Iran yang terpuruk. Hal tersebut membuat embargo Iran dicabut pada tahun 2016. Oleh karena itu, dalam proses hubungan dan kerjasama yang terjalin antara AS-Iran mengalami dinamika yang pada akhirnya terjadi berbagai benturan, terutama persoalan nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Kondisi tersebut membuat AS harus berhati-hati atas keputusan Iran, jika negara mullah tersebut mengembangkan nuklir. Apalagi menyerang dan menjadikan AS sebagai target nuklir Iran.

Hassan Rouhani dianggap sebagai salah satu presiden Iran yang memberikan harapan baru dalam

proses pengembangan nuklir. Ia juga melakukan berbagai upaya dalam menunjukkan sikap yang terbuka terkait pengembangan nuklir dan hal itu dianggap sebagai usaha memberikan kepercayaan dalam program pengembangan nuklir Iran. Rouhani juga melakukan upaya untuk mencabut sanksi yang diterima oleh Iran dan berusaha menjalin kedekatan hubungan dengan negara-negara Barat dalam penyelesaian permasalahan nuklir. Usaha-usaha tersebut dilakukan sebagai bagian upaya Rouhani untuk mempermudah perdamaian program nuklir dan dapat dicabutnya sanksi-sanksi yang membuat ekonomi Iran terus memburuk (Adiyudha & Haqqi, 2017).

Tidak hanya itu, Rouhani juga berupaya dalam memberikan harapan terkait kesepakatan dan proses penyelesaian program nuklir Iran. Sikap tersebut dianggap sangat berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Ahmadinejad semasa ia menjabat sebagai presiden Iran. Atas usaha tersebut, Rouhani dinilai melakukan gebrakan penting dan masyarakat internasional pun merespon positif sikap Iran dalam meninjau ulang kesepakatan nuklir.

Kebijakan yang dilakukan oleh Rouhani dalam penyelesaian nuklir yakni pada 27 September 2013. Rouhani hadir dalam Sidang Umum PBB di New York dan saat pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif bertemu dengan perwakilan dari China, Rusia, AS, Prancis, Inggris, dan Jerman atau yang disebut dengan kelompok P5+1. Pertemuan tersebut membahas terkait bagaimana proses pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran dan penyelesaiannya. Jika melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Iran sebelumnya, diantaranya yakni bersikap tertutup dan anti atas campur tangan Barat atas persoalan program pengembangan nuklir. Akan tetapi, di masa pemerintahan Rouhani mulai terbuka dan bersikap kooperatif.

Selain itu, Iran juga berusaha menyelesaikan program nuklirnya dengan perundingan di tanggal 15-16 Oktober 2013 di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini sebagai bagian untuk menindaklanjuti kesepakatan yang diambil oleh pemerintah Iran dan kelompok P5+1 di New York agar segera menyelesaikan masalah nuklir Iran di meja perundingan. Pertemuan Jenewa antara Iran dengan kelompok P5+1 memulai babak baru bagi

permasalahan program nuklir Iran. Pada pertemuan ini Iran diwakili oleh Menlu Javad Zarif menyampaikan proposal program nuklir

Proposal tersebut berisi penetapan batasan-batasan pengembangan nuklir yang boleh dilakukan Iran dengan konsekuensi yang akan diterima, akan tetapi Barat harus mengakui hak Iran untuk memperkaya uranium sebagai negara nuklir. Didalamnya juga disebutkan bahwa pemerintah Iran berharap kepada Barat untuk segera mencabut sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan atas program nuklir Iran khususnya terkait perbankan dan industri minyak Iran.

Menanggapi usulan dari pemerintah Iran yang tertuang dalam proposal nuklir Iran ditanggapi dengan baik oleh pihak Barat. Bagi Barat usulan yang disampaikan delegasi Iran sebagai sebuah partisipasi penting bagi terciptanya kesepakatan mengenai permasalahan nuklir Iran. Juru runding barat yang diwakili oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton menyambut baik usulan yang disampaikan dengan mengapresiasi langkah Pemerintah Iran dalam menyelesaikan permasalahan nuklirnya Melalui pertemuan ini

delegasi dari kedua belah pihak menyetujui melaksanakan perundingan kembali mengenai nuklir Iran yang telah dilaksanakan pada 7-9 November 2013 di Jenewa, Swiss. Dengan semakin kooperatifnya pemerintah Iran dalam berunding dengan kelompok P5+1 membuktikan Iran siap untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan nuklirnya. Sikap pemerintah Iran agar segera menyelesaikan permasalahan nuklirnya mendapatkan sambutan baik dari masyarakat internasional, dimulainya kembali perundingan dengan Barat, pemerintah Iran juga semakin berharap adanya hasil yang baik untuk menyelesaikan permasalahan mengenai program nuklir Iran.

Untuk melanjutkan diplomasi multilateral pemerintah Iran dan kelompok P5+1 melanjutkan kembali perundingan yang membahas tentang nuklir Iran pada tanggal 7-9 November 2013 di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan ini pemerintah Iran menyiapkan usulan tiga tahap dalam membicarakan permasalahan nuklir Iran, pemerintah Iran mengajukan paket usulan tiga tahap untuk lebih menguatkan komitmen barat maupun Iran untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya. Paket usulan

ini apabila disetujui pada tahap awal akan disepakati bahwa tiap-tiap perwakilan teriat komitmen untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Bagi pemerintah Iran pada tahap awal ini akan menjadi dasar dari dalam menyelesaikan permasalahan nuklir pada tahap-tahap berikutnya. Pemerintah Iran juga menyatakan bahwa akan membatasi produksi uraniumnya sebesar 20% dengan imbalan Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai memangkas sanksi yang diberikan kepada Iran terkait program nuklirnya. Dengan melihat tuntutan dari Iran maka perwakilan dari kelompok P5+1 berjanji akan melanjutkan perundingan kembali 10 hari kemudian. Tidak tercapainya kesepakatan resmi antara Menlu Iran dan Menlu kelompok P5+1 selama berlangsungnya perundingan membuat tidak adanya kesepakatan yang berarti dalam menyelesaikan permasalahan nuklir Iran.

Setelah gagalnya perundingan di Jenewa tanggal 7-9 November, Menlu Iran Javad Zarif kembali melakukan perundingan dengan Menlu kelompok P5+1 untuk menyelesaikan persoalan nuklir Iran. Pada tanggal 20 November 2013 tim negosiator Iran melakukan pertemuan kembali guna berunding dengan

kelompok P5+1 untuk melanjutkan kembali pembahasan mengenai permasalahan program nuklir Iran. Perundingan ini berjalan dengan sedikit lambat akibat sulitnya mendapatkan titik temu untuk menyepakati program nuklir antara Iran delegasi Iran dengan kelompok P5+1. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak yaitu Iran maupun kelompok P5+1 sudah memasuki pembahasan yang lebih dalam terhadap program nuklir Iran.

Negosiasi antara Iran dan Kelompok P5+1 pada tanggal 20 November di Jenewa telah memasuki tahapan yang lebih mendalam terhadap persoalan nuklir. Kedua belah pihak akhirnya menandatangani kesepakatan sementara yang dinamakan Joint Plan of Action (JPOA). Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 24 November tersebut berisi tentang pengakuan terhadap program nuklir Iran oleh Kelompok P5+1. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Joint Plan of Action (JPOA) tersebut, Iran diwajibkan menghentikan kegiatan pengayaan uraniumnya dalam jangka waktu 6 bulan, uranium yang dihasilkan oleh Iran juga harus diencerkan hingga batas pengayaan maksimal sebesar

5%, Iran juga dilarang membangun instalansi sentrifugal baru yang digunakan untuk pengayaan uranium dan mengizinkan IAEA untuk menginspeksi reaktor nuklir Iran. Dengan kesepakatan yang dicapai ini pihak barat berjanji akan melongarkan sanksi yang diterima Iran dan akan mencabut embargo maupun sanksi terhadap minyak bumi dan logam mulia dari Iran.

Sebagian golongan di Iran sebenarnya tidak begitu optimis dengan adanya niatan presiden Hassan Rouhani dalam melaksanakan perundingan dengan Barat untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Melihat dari adanya pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan ketidakseriusan Barat untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Tetapi dengan adanya perundingan tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari semangat rakyat Iran untuk tetap mengembangkan nuklirnya menghadapi arogansi dunia dan tekanan- tekanan politik dari Barat. Dengan kesepakatan nuklir sementara antara Iran dan kelompok P5+1 dapat dinilai sebagai hasil dari diplomasi efektif yang ditunjukkan oleh pemerintah Iran untuk segera mendapatkan kesepakatan untuk mencabut sanksi-sanksi internasional.

Setelah adanya perjanjian *Joint Plan of Action (JPOA)* pada bulan November 2013, pemerintah Iran telah bersiap dalam melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam kesepakatan tersebut. Pemerintah Iran mulai tanggal 20 Januari 2014 memberikan akses seluas-luasnya terhadap Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran. Perundingan antara pemerintah Iran dan Kelompok P5+1 kembali dilanjutkan pada 18 Februari 2014 di Wina, Austria. Dalam perundingan kali ini Kelompok P5+1 meminta Iran untuk segera membatasi kegiatan nuklirnya, Iran juga diminta untuk segera membatasi jumlah mesin sentrifugalnya. Bahkan, Iran diminta untuk mengganti reaktor air berat yang dimilikinya untuk diubah ke air ringan. Menanggapi tuntutan Kelompok P5+1 tersebut pemerintah Iran akan bekerja kooperatif dalam sanksi-sanksi yang diterima oleh Iran. Dalam perundingan ini tidak ada kesepakatan yang disetujui untuk penyelesaian permasalahan nuklir Iran. Tapi dalam perundingan ini disepakati bahwa perundingan akan dilanjutkan kembali pada bulan Juli bersamaan dengan berakhirnya batasan waktu dalam JPOA.

Iran juga berupaya serius untuk mencabut sanksi internasional dengan melakukan diplomasi multilateral dibuktikan kembali dengan melaksanakan perundingan pada 2-19 Juli 2014 di Wina, Austria. Perundingan ini melanjutkan kembali kesepakatan nuklir yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. dalam perundingan ini disepakati bahwa perundingan nuklir ini akan dilanjutkan oleh kedua belah pihak dengan deadline bulan November. Kedua belah pihak juga mengumumkan tindakan tambahan yang akan diambil oleh kedua belah pihak yaitu, Iran akan mengkonversi bubuk uranium yang diperkaya menjadi 2% dengan imbalan kelompok P5+1 akan memulangkan dana Iran yang berada diluar negeri sebesar 2,8 miliar dolar (www.armscontrol.com). Pada 5 September 2014, IAEA mengeluarkan hasil dari inspeksinya terhadap Iran dan menyampaikan bahwa pemerintah Iran menunjukkan sikap yang terbuka dan mematuhi kesepakatan dengan baik. Dengan adanya perkembangan positif dan sikap yang ditunjukkan Iran tersebut semakin menguatkan akan terciptanya kesepakatan yang saling menguntungkan atas permasalahan nuklir Iran.

Pada bulan September 2014, perwakilan Iran bertemu kembali dengan kelompok P5+1 untuk melanjutkan perundingan mereka di sidang Majelis Umum PBB di New York. Kedua belah pihak mengatakan bahwa perundingan ini menghasilkan sedikit kemajuan yang dibuat di ujung pembicaraan. Perundingan kedua belah pihak kemudian dilanjutkan kembali pada 14-16 Oktober 2014 di Wina. Para pejabat mengatakan bahwa mereka tetap fokus untuk mencapai kesepakatan dengan tenggat waktu pada 24 November 2014. Pada 9 November 2015 Menlu Javad Zarif bertemu dengan John Kerry di Muscat, Oman untuk membicarakan jalannya perundingan yang akan berlangsung pada 18-24 nanti, dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh ketua negosiator dari Kelompok P5+1 yaitu Catherine Ashton.

Pembicaraan antara kelompok P5+1 dan pemerintah Iran akhirnya dilanjutkan kembali di Jenewa pada bulan Januari 2015. Departemen Luar Negeri Amerika menyampaikan bahwa pembicaraan yang dilakukan antara Iran dengan P5+1 semakin baik. Kedua pihak berencana untuk bertemu kembali pada bulan Januari 2015. Untuk menguatkan kepercayaan di kedua belah pihak Menlu Javad

Zarif mengirimkan surat kepercayaan kepada setiap delegasi yang berisi Iran memiliki tujuan tetap untuk mencapai kesepakatan nuklir komprehensif dan menjamin program nuklir Iran benar-benar dijalankan untuk kepentingan nasionalnya secara damai.

Perundingan dalam rangka menyelesaikan permasalahan nuklir Iran kembali dijalankan oleh masing-masing delegasi. Pertemuan antara perwakilan Iran dengan kelompok P5+1 dilakukan pada 15-18 Januari 2015 bertempat di Jenewa. Pertemuan ini membicarakan tentang program nuklir Iran dan membahas pedoman maupun instruksi yang diperlukan bagi tim negosiasi yang akan melakukan pertemuan kembali di Wina, Austria. Pertemuan ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesepakatan sebelum akhir Juni. Perundingan antara 6 negara yang tergabung dalam kelompok P5+1 kembali dilakukan pada bulan Maret 2015 bertempat di Lausanne, Swiss. Negosiasi yang mempertemukan antara pejabat tinggi kedua belah pihak mulai menunjukan kejelasan bagi proses kesepakatan nuklir Iran sebelum batas akhir pencapaian kesepakatan yang ditentukan pada 31 Maret.

Melalui negosiasi tersebut masing-masing pihak masih membawa tuntutan untuk segera disepakati dalam perundingan ini. Dalam perundingan ini Pemerintah Iran kembali menyakinkan kelompok P5+1 bahwa Iran tidak memiliki keinginan mengembangkan nuklirnya untuk kepentingan militer yaitu pembuatan bom atom, Menlu Zarif juga menyampaikan keinginan dari pemimpin besar Iran Ali Khamenei untuk meminta Barat segera mencabut sanksi-sanksi internasional dan embargo yang dijatuhkan kepada pemerintah Iran akibat dikembangkannya nuklir. Dalam perundingan ini kelompok P5+1 meminta Iran untuk mengurangi pengayaan mesin sentrifugal yang dijalankan Iran dibawah tanah yaitu pabrik Fordow, kelompok P5+1 juga meminta Iran untuk mengurangi lagi mesin sentifugalnya yang dimilikinya.

Perundingan antara Iran dan kelompok P5+1 akhirnya menunjukkan hasil yang baik untuk kedua belah pihak pada 2 April 2015. Perundingan yang panjang dibulan Maret membuahkan terobosan baru dalam sejarah perkembangan program nuklir Iran, melalui pernyataan bersama antara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica

Mogherini dan Menlu Iran Javad Zarif menyatakan kedua belah pihak telah menyepakati sebuah hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak barat berjanji akan melongarkan sanksi ekonominya Iran dan diizinkan untuk mengembangkan nuklir untuk kepentingan nasionalnya yaitu pemenuhan energi bahkan, Iran dilarang untuk membangun pabrik pengayaan uranium yang baru.

Kesepakatan yang dicapai antara Iran dengan Kelompok P5+1 pada bulan April sebenarnya sudah memberikan kemajuan yang baik dalam penyelesaian nuklir Iran, belum tercapainya kesepakatan yang lebih inti yaitu bagi barat menginginkan penghentian program nuklir Iran secara permanen dan bagi Iran meminta Barat untuk mencabut seluruh sanksi-sanksinya terhadap Iran. Walaupun masih belum ada kesepakatan yang tercapai masing-masing delegasi atas perundingan tersebut. Dengan komitmen dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan nuklir semakin membuat pemerintah Iran yakin akan mencapai kesepakatan terbaik atas program nuklirnya yang selama ini tidak ada kejelasan. Perundingan nuklir Iran kembali dijalankan pada bulan Juli 2015.

Kedua delegasi bertemu di Wina, Austria untuk menyelesaikan pembahasan mereka mengenai program nuklir Iran. Dalam perundingan ini kelompok P5+1 meminta Iran untuk membatasi program nuklir sehingga tidak akan digunakan untuk membangun senjata nuklir. Perundingan ini sebenarnya telah melewati batasan waktu yang telah ditetapkan pada bulan april.

Iran juga serius untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya kembali dibuktikan dengan menjalin diplomasi dengan kelompok P5+1. Pemerintah Iran bertemu kelompok P5+1 di Wina, Austria pada 14 Juli 2015 untuk bernegosiasi kembali. Dalam perundingan ini, masing-masing perwakilan masih membawa keinginan masing-masing mengenai permasalahan nuklir Iran. Pemerintah Iran meminta barat untuk segera mencabut sanksi yang dijatuhkannya dan Iran berjanji akan menghentikan kegiatan nuklirnya dan berjanji akan bersikap kooperatif terhadap IAEA. Dalam perundingan ini akhirnya disepakati mengenai rencana Aksi bersama secara komprehensif yang disebut dengan Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan antara pemerintah Iran dan 6 kekuatan Barat

ini merupakan kesepakatan yang bersejarah bagi rakyat Iran khususnya Pemerintahan Rouhani setelah tidak adanya titik temu kesepakatan yang menguntungkan selama berpuluh-puluh tahun dijalankannya program nuklir Iran.

Dengan disepakatinya JCPOA, pihak pemerintah Iran bersedia untuk membatasi kegiatan nuklirnya dengan jangka waktu lama di berbagai pabrik tenaga nuklir yang dimiliki Iran antara lain Bushehr, Isfahan, Natanz, Arak dan Fordo, tambang uranium di Gachin dan pusat penelitian dan pengembangan kompleks militer di Parchin. Pemerintah Iran juga mempersilahkan IAEA untuk melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap kegiatan nuklir Iran, bahkan Pemerintah Iran berjanji akan mengurangi produksi uraniumnya dan mesin sentrifugal yang dimilikinya selama jangka waktu 15 tahun, Pemerintah Iran dilarang memperkaya dan menumpuk uranium melebihi 3,6%, Iran juga dilarang untuk membangun fasilitas pengayaan uranium yang baru. Dengan disetujuinya kesepakatan JCPOA ini maka pihak barat akan segera mencabut sanksi-sanksi terhadap Pemerintah Iran, bahkan Iran akan mendapatkan bantuan dana dan

pemulihan aset-aset yang dibekukan oleh Barat.

Dengan jatuhnya sanksi dan embargo yang diberikan oleh Barat dan dengan disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB semakin menyudutkan Iran yang menyebabkan perekonomian Iran terpuruk. Untuk memulihkan perekonomian Iran maka Presiden Hassan Rouhani menyiapkan sebuah gebrakan nyata dalam memperbaiki perekonomian Iran. Untuk menjalankan keinginan Hassan Rouhani, pemerintah Iran menjalin komunikasi dengan Barat untuk bernegosiasi menyelesaikan permasalahan nukli Iran. Dengan sikap terbuka dan kooperatif Pemerintah Iran memulai perundingan dengan 6 kekuatan besar dunia yang tergabung dalam kelompok P5+1 yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China dan Jerman.

Perundingan antara pihak Iran dan kelompok P5+1 semakin menunjukkan bukti diplomasi yang efektif dari Iran dalam menghadapi tekanan internasional. Presiden Hassan Rouhani menekankan untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan menggunakan jalan diplomasi tanpa menggunakan kekerasan bahkan dengan menjatuhkan sanksi. Dengan

membuka kembali komunikasi dan bersikap kooperatif, Pemerintah Iran masa Presiden Hassan Rouhani menunjukkan kekuatan diplomasi Iran kepada internasional. Melalui diplomasi multilateral yang dilakukan dengan kelompok P5+1 semakin membuka jalan bagi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Melalui kesepakatan yang tercapai dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) membuktikan Iran mampu menghadapi tekanan Barat tanpa perlu mengorbankan program nuklirnya. Bahkan dengan meyakinkan Barat, pemerintah Iran mendapatkan keuntungan melalui pencabutan sanksi-sanksi internasional yang diterima Iran akibat dikembangkannya program nuklir.

Penyebab AS Keluar dari Perjanjian JCPOA

Proses politik dan kerjasama yang terjalin antara Iran-AS terus mengalami perbenturan dan gejolak. Diantaranya isu nuklir menjadi hal penting mengapa kedua negara sering terlibat konflik. Jika melihat bagaimana proses perjanjian nuklir antara Iran dan AS, perjanjian JCPOA yang diinisiasi oleh AS menjadi salah satu perjanjian penting untuk

merespon dan memantau pengembangan nuklir di Iran.

JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) merupakan suatu kesepakatan nuklir antara Iran dan negara 'P5+1' (AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Jerman) yang disahkan pada tanggal 14 Juli 2015 (Rahim, 2019). Terdapat lima poin penting yang disepakati dalam perjanjian JCPOA, yakni:

1. Pembatasan terhadap level pengayaan uranium hexafluoride, yang mana pembatasannya berlaku hingga 15 tahun.
2. Untuk menghindari serangan udara dari musuh, Iran memiliki dua fasilitas pengayaan uranium yakni Natanz dan Fordow. Natanz berada di bawah permukaan tanah dan Fordow terletak didalam gunung yang tidak aktif. Namun, dalam kesepakatan ini kapasitas pengayaannya dibatasi. Iran diizinkan melanjutkan pengayaan uranium yang bertempat di Natanz, namun dalam jumlah yang terbatas. Sedangkan Fordow hanya menjadi tempat pusat teknologi fisika dan nuklir.
3. Pembatasan stok jumlah uranium yang diperkaya pada level rendah. Selama 15 tahun Iran hanya dapat mengayak uranium sebanyak 300 kg pada level 3,67%.

4. Penggantian stok plutonium.

5. Pengembangan nuklir di Iran berada di bawah pengawasan IAEA (*International Atomic Energy Agency*). (B. Riza, 2019)

Namun, pada akhirnya AS keluar dari proses perjanjian pada masa pemerintahan Donald Trump, yakni pada tanggal 8 Mei 2018 (Rahim, 2019). Hal ini dilakukan AS atas berbagai pertimbangan, terutama faktor ketidaksepakatan AS atas isi perjanjian tersebut. Trump memutuskan untuk keluar dari kesepakatan tersebut dan mengeluarkan keputusan untuk menerapkan sanksi penuh atas Iran. Hal ini membuat Iran harus mengalami instabilitas ekonomi dan negara tersebut berjuang dalam mengatasi krisis ekonomi yang diberikan oleh AS.

Tidak hanya itu, jika melihat bagaimana proses pengunduran diri dan efektivitas diplomasi AS atas keluarnya dari JCPOA patut dicermati lebih jauh. Di dalam kasus ini, ada beberapa hal yang menjadi fokus kajiannya, yakni terkait bagaimana legitimasi tujuan sanksi AS, legitimasi dan konsistensi permintaan AS, kredibilitas ancaman AS, kredibilitas tekanan waktu yang dimiliki oleh AS,

dan motivasi AS dan Iran dalam proses pengembangan nuklir. Dalam proses legitimasi tujuan sanksi AS, yakni proses kesepakatan JCPOA tahun 2015, Iran telah memutuskan untuk melakukan pembatasan atas pengembangan nuklirnya. Bahkan, IAEA melalui berbagai mekanisme yang telah dilakukannya berusaha melakukan verifikasi atas Iran dalam pembatasan nuklir tersebut. IAEA setiap tiga bulan sekali membuat laporan mengenai implementasi JCPOA oleh Iran dan terbukti bahwa Iran mematuhi kesepakatan tersebut. Namun, pada Agustus 2017, AS justru menjatuhkan sanksi baru kepada Iran karena dianggap mendukung kelompok militan dan mengembangkan rudal balistik (Abdillah, 2019).

Selanjutnya, Trump menganggap bahwa kesepakatan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan kehendaknya, bahkan tidak cukup dalam meredam ancaman Iran atas AS. Situasi ini membuat Iran dinilai masih belum transparan dan terbuka dalam proses pengembangan nuklir tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan deterensi yang dilakukan oleh Iran atas AS, yakni Iran berusaha terus melakukan pengembangan nuklir dan

AS merespon dengan tegas untuk membatasi program nuklir Iran.

Situasi yang sulit tersebut digunakan AS dalam berunding dengan Iran, agar negara tersebut mau berunding dengan AS terkait program nuklir dan ada kesepakatan baru yang akhirnya mencegah Iran mengembangkan nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Kondisi ini akan membuat AS merasa aman dan tidak terganggu dengan proses pengembangan nuklir Iran.

Namun, pasca keluarnya AS atas perjanjian JCPOA, Trump berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Keduanya membahas terkait Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir (Mikail, 2018). Hal ini menjadi keputusan Trump untuk keluar dari proses kesepakatan JCPOA dan ia akan terus melakukan sanksi atas Iran karena Iran akan selalu menghalangi kepentingan AS di negara-negara Timur Tengah.

Pasalnya, faktor Israel dan kepentingan AS atas Timur Tengah menjadi faktor penentu kebijakan Trump. Hal ini sesuai dengan prioritas kepentingan nasional AS, yakni: 1). Mempertahankan Israel dan melakukan berbagai hal dalam proses penyelesaian perdamaian di kawasan

Timur Tengah, 2). Membuka akses atas minyak, 3). Melakukan pencegahan atas munculnya kekuatan dan kekuasaan lain, 4). Melakukan pencegahan atas negara yang berusaha mengembangkan senjata pemusnah massal, 5). Berusaha meningkatkan reformasi ekonomi dan politik di negara-negara Timur Tengah.

Hal tersebut menjadi alasan kebijakan politik dan kebijakan luar negeri AS atas Timur Tengah, termasuk kebijakannya atas Iran. Namun, nampaknya kebijakan AS tersebut dihalangi oleh Iran. Bahkan, Iran adalah salah satu negara di kawasan yang sangat kontra dengan AS dan berusaha menentang segala bentuk dominasi AS atas Timur Tengah. Situasi ini juga membuat AS menjadikan Iran sebagai ancamannya. Kondisi tersebut membuat AS melakukan berbagai upaya dan strategi untuk menekan Iran, termasuk penggunaan isu senjata nuklir sebagai alasan untuk memberikan sanksi ekonomi dan bahkan memutus hubungan dan kerjasama dengan Iran.

Untuk itu, Iran mengalami kesulitan dalam sektor ekonominya. Tidak hanya itu, AS terus menambahkan daftar sanksinya. Bahkan, Departemen Keuangan AS memberi sanksi atas perusahaan yang

membeli minyak dari salah satu perusahaan minyak Iran, yakni The National Iranian Oil Company (NIOC), diantaranya yaitu Ras Al Khaimah-based Petro Grand FZE, Alphabet International DMCC, Swissol Trade DMCC, Alam Althra General Trading LLC dan Alwaneo LLC. Faktor yang menjadi alasan AS memberikan sanksi atas perusahaan-perusahaan tersebut karena mereka berupaya membantu Iran dalam memberikan dukungan dan biaya teroris, seperti halnya IRGC Quds Force, meski dibalik itu adalah untuk membiayai kesehatan dan kesejahteraan rakyat Iran secara keseluruhan.(Assri, 2020)

Namun, perlu diketahui bahwa IRGC Quds Force merupakan Garda Revolusi Iran yang selama ini berupaya melakukan dukungan di negara-negara sekutu Iran, termasuk diantaranya yakni membantu pemerintah Suriah dan Irak dalam menghalau pasukan ISIS. Selain itu, kematian Jenderal Qassem Soleimani pada 3 Januari 2020 di Irak yang dibom oleh militer AS. Hal itu membuat Iran geram dan marah atas upaya pembunuhan yang telah direncanakan tersebut. Hingga Iran harus membalas dendam kematian Soleimani dengan menyerang

pangkalan militer Ain Al-Assad di Irak pada 8 Januari 2020. Atas insiden tersebut, AS pun mengumumkan sanksi baru atas Iran terhadap ekspor logam Iran dan beberapa pejabat senior yang terlibat dalam upaya tersebut (Mikail, 2018).

Tidak selesai dari sanksi tersebut, pada 26 Maret 2020, AS berupaya menjatuhkan sanksi kembali atas Iran, yakni mengarah pada perusahaan-perusahaan Irak dan Iran yang dituduh bekerjasama dengan RGC Quds Force, antara lain; Reconstruction Organisation of the Holy Shrines in Iraq (ROHSI) and the Kosar Company. Beberapa perusahaan yang diembargo oleh AS, yakni Khamael Maritime Services, sebuah perusahaan pelayaran yang berbasis di Irak yang dituduh AS telah memfasilitasi penjualan minyak Iran. Hingga pada Mei 2020, AS melarang warga negaranya untuk melakukan aktivitas bisnis dengan beberapa perusahaan yang telah di-black list oleh AS dan aset-aset perusahaan tersebut telah dibekukan. Bahkan, Departmen Keuangan juga memberikan sanksi atas Menteri Dalam Negeri Iran, Abdolreza Rahmani Fazli dengan alasan ia telah melakukan pelanggaran HAM (Macias, 2020).

Melihat beberapa paparan tersebut, dapat diketahui bahwa AS telah menjatuhkan sanksi atas Iran, terutama terkait sanksi ekonomi. Hal ini tentu membuat Iran kesulitan dan upaya tersebut dianggap sebagai usaha AS untuk menghentikan dan menghalangi aktivitas ekonomi Iran, juga terkait bagaimana proses pengembangan nuklir Iran terhenti. Namun, nampaknya Iran masih bersikeras terus mengembangkan nuklirnya, meski pada hakikatnya nuklir Iran digunakan untuk pemenuhan energi bagi negara tersebut. Tetapi, berbeda dengan perspektif AS yang menganggap hal tersebut sebagai usaha Iran untuk menyiapkan amunisi untuk meng-counter AS dan negara-negara yang kontra dengan Iran.

Latar Belakang Iran dalam Pengembangan Nuklir

Rouhani merupakan seorang akademisi, diplomat dan politikus yang moderat. Jika dilihat dari sepaik terjang Rouhani sebelumnya, ia pernah menduduki jabatan sebagai kepala tim negosiasi nuklir dan negosiator Iran dengan EU 3- yaitu Inggris, Perancis, dan Jerman pada program nuklir Iran. Di bawah kepemimpinan Rouhani, Iran tercatat

pernah melakukan pembicaraan tentang pengembangan program nuklir bersama AS dan lima negara lainnya yaitu Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Jerman (Saragih, 2018).

Seperti halnya, ditandatanganinya kesepakatan JCPOA atas pemerintah AS di masa pemerintahan Obama dan pemerintah Iran, serta beberapa negara lain, termasuk diantaranya yakni Israel, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Pada dasarnya negara-negara tersebut merespon negatif kesepakatan tersebut. Upaya tersebut dinilai bagi mereka sebuah ancaman dan memberikan legitimasi bagi Iran dalam memberikan pengaruh dan kekuatan Iran di kawasan. Situasi tersebut juga menimbulkan dilema stabilitas keamanan. Hal ini dinilai bahwa dengan bertambahnya kekuatan militer Iran akan memberikan ancaman bagi negara-negara lainnya. Bahkan, selama proses perjanjian JCPOA, Iran melakukan penguatan di rudal balistiknya. Tentu, situasi ini membuat negara-negara lain merasa khawatir atas upaya tersebut.

Uji coba balistik yang dilakukan oleh Iran pada dasarnya tidak masuk dalam poin kesepakatan JCPOA. Implikasinya, AS merespon atas uji coba tersebut dan menilai Iran

berusaha mencederai kesepakatan nuklir yang telah dibuat. Maka, keberlanjutan program misil balistik juga menyisakan pertanyaan besar terkait misi dan arah serta tujuan Iran untuk melakukan pengembangan misil balistik tersebut. Kondisi demikian membuat dilema keamanan semakin besar, negara-negara lain pun saling menaruh rasa curiga atas negara yang berusaha memperkuat kapabilitas militernya. Tetapi, Ketika satu negara melakukan penguatan atas militernya, negara lain menganggapnya sebagai ancaman. Situasi ini juga membuat AS dengan perspektif kebijakan luar negerinya berusaha memproteksi stabilitas keamanan Israel, kapabilitas rudal dan program nuklir yang dinilai sebagai sebuah ancaman bagi AS.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka jika dilihat dari perspektif deterensi Iran sebagai negara yang memiliki pengembangan nuklir, maka menjadi sebuah negara yang diperhitungkan. Pasalnya, Iran juga mempunyai pengaruh yang signifikan di kawasan Timur Tengah. Sehingga, hal ini menjadi kendala bagi AS dalam melakukan ekspansi hegemoni di kawasan tersebut.

Untuk itu, Iran pun terus melakukan proses pengembangan nuklir. Meski ia harus dimusuhi dan

dianggap sebagai negara pembangkang telah melakukan aktivitas pengembangan nuklir. Tetapi, bagi AS dengan upaya sanksi dan embargo ekonomi yang

KESIMPULAN

Konstelasi hubungan antara Iran-AS mengalami pasang surut yang dinamis. Pasca revolusi Islam Iran yang meletus pada tahun 1979 menjadikan negara tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kawasan Timur Tengah. Hal ini membuat AS menganggap Iran sebagai rivalnya. Apalagi Iran sebagai negara di kawasan yang menentang dominasi AS atas kawasan tersebut menjadikan hubungan antar kedua negara semakin rumit dan rentan terjadi perselisihan.

Selanjutnya, konflik yang menyebabkan ketidakharmonisan antara Iran-AS yakni isu pengembangan nuklir. Persoalan ini menjadi semakin rumit Ketika AS memutuskan keluar dari anggota perjanjian JCPOA pada tahun 2015. Meskipun pada kenyataannya tidak ada indikasi bahwa Iran melanggar isi

dijatuhkan atas Iran adalah usahanya untuk menghambat dan menghentikan usaha Iran dalam proses pengembangan nuklir.

perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Iran-AS pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor isu pengembangan nuklir saja. Namun, juga dipengaruhi oleh faktor kepentingan AS di Kawasan Timur Tengah, faktor ideologi serta faktor militer

Terakhir, Iran tetap fokus dalam mengembangkan nuklir, meskipun konsekuensinya negara tersebut harus menuai banyak protes dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, embargo dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran membuat negara tersebut harus mengalami berbagai guncangan ekonomi dan berbagai kesulitan. Termasuk diantaranya yakni penghentian bantuan dari AS.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. F. (2019). *Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundurnya*

Amerika Serikat Dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

- Adiyudha, C., & Haqqi, S. H. & H. (2017). Diplomasi Multilateral Iran dalam Upaya Pencabutan Sanksi Dewan Keamanan PBB (Pada Masa Presiden Hassan Rouhani). *Transformasi*, 1(30).
- Assri, B. C. A. (2020). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iran Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal ICMES*, 4(1), 29–45.
- Farhan, M. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Senegal di Masa Pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 7(1), 66–91.
- Ibad, F., & Muta'ali, A. (2021). Identitas dan Kebijakan Luar Negeri: Konstruksi Identitas dalam Kebijakan Luar Negeri Tunisia Pasca Revolusi. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 8(1).
- Kadir, A. (2015). Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1).
- M. Riza Sihbudi. (1989). *Dinamika revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah hingga Wafat Ayatullah Khomeini*. Pustaka Hidayah.
- Macias, A. (2020, May 20). *U.S. targets Iran's interior minister in latest round of sanctions*. CNBC. <https://www.cnn.com/2020/05/20/us-targets-irans-interior-minister-in-latest-round-of-sanctions.html>
- Mikail, K. (2018). Perjanjian Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Kepentingan USA-Israel di Timur Tengah. *Jurnal ICMES*, 2(1), 69–85.
- Mikail, K., & Fatoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 3(1), 1–16.
- Phoenna, R. P., & Harmiyati, H. (2018). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani. *Paradigma*, 20(1).
- Putri, G. E. (n.d.). *Pandangan Politik Mahmoud Ahmadinejad Studi Kasus: Hubungan Iran-Amerika Serikat (2005-2009)*.
- Quackenbush, S. (2016). *Understanding General Deterrence: Theory and Application*. Palgrave Macmillan.
- Rahim, M. H. (2019). Post JCPOA. *Jurnal ICMES*, 3(1), 27–52.

- Ramadhan, R. B. (2019). Pengaruh Peningkatan Kekuatan Iran Terhadap Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1), 111–126.
- Riza, A. K. (2017). Menakar Ideologi Republik Islam Iran: Kontestasi Antara Ideologi dan Pragmatisme dalam Politik. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(2), 279–301.
- Riza, B. (2019, May 9). 5 Poin dari Kesepakatan Nuklir Iran. Tempo. <https://dunia.tempo.co/read/1203564/5-poin-dari-kesepakatan-nuklir-iran>
- Saragih, H. M. (2018). Perubahan Arah Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Amerika Serikat dalam Program Nuklir Iran pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 5(1).
- Sumarno, W. F. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 145–158.
- Taufiq, F. (2018). Arah Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Kontestasi Iran dan Arab Saudi. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(1), 84–97.